

## HUBUNGAN KETERBUKAAN INFORMASI DAN PENGGUNAAN MEDIA DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

### *RELATIONSHIP OF INFORMATION DISCLOSURE AND MEDIA USE WITH COMMUNITY PARTICIPATION IN THE NATIONAL HEALTH INSURANCE PROGRAM (JKN) IN FIFTY CITY DISTRICT*

Devi Marlina <sup>1\*</sup>, Erwin <sup>2)</sup>, Najmudin.Med<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup>\*Mahasiswa Pembangunan Wilayah dan Pedesaan, Universitas Andalas

<sup>2)</sup>Dosen Pembangunan Wilayah dan Pedesaan, Universitas Andalas

<sup>3)</sup> Dosen Pembangunan Wilayah dan Pedesaan, Universitas Andalas

**ABSTRAK:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara keterbukaan informasi, penggunaan media program Jaminan Kesehatan Nasional dengan Partisipasi masyarakat untuk ikut jadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun metoda yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian adalah metoda penelitian kuantitatif dengan menggunakan teori Andersen. Responden pada penelitian ini berjumlah 381 sampel, dimana untuk mendapatkan informasi dari responden menggunakan kuesioner dan kemudian diolah dengan menggunakan aplikasi SPSS (*Statistical Package for social Sciences*). Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan korelasi *rank Spearman* didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara keterbukaan informasi dengan partisipasi masyarakat dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), selanjutnya juga terdapat hubungan yang signifikan antara penggunaan media dengan partisipasi masyarakat dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kata kunci: Keterbukaan Informasi, Penggunaan Media, Partisipasi Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

**ABSTRACT:** *The purpose of this study was to determine the relationship between information disclosure and media use in the national health insurance program with public participation in the National Health Insurance (JKN) program in Limapuluh Kota Regency. This study uses Andersen's theory with quantitative research methods. The questionnaire was used as a data collection instrument where there were 381 respondents as the sample analyzed in this study. Further research data were analyzed with the help of the SPSS (Statistical Package for Social Sciences) application.*

*The results of the "Rank Spearman" correlation test analysis show that there is a significant relationship between information disclosure and public participation in the National Health Insurance Program (JKN), as well as a significant relationship between media use and community participation in the National Health Insurance Program (JKN).*

*Keywords: Information Disclosure, Media Use, Participation in the National Health Insurance Program (JKN)*

#### A. PENDAHULUAN

Pembangunan adalah perubahan yang akan mengantarkan kita ke arah yang lebih baik. Pembangunan tersebut tidak hanya memperhatikan aspek fisik namun juga dimensi sosial dan ekonomi yang erat kaitannya dengan masyarakat. Pemerintah sebagai salah satu pelaksana pembangunan diharapkan memiliki aparat yang kompeten apalagi dengan perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintah dari “dilayani menjadi melayani” dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) (Riyadi dan bratakusuma 2005).

Dalam pembangunan, peran serta masyarakat sangat penting. Tanpa peran masyarakat, tujuan pembangunan ini akan sulit tercapai. Pembangunan yang sehat merupakan bagian dari pembangunan nasional. Dalam proses ini masih terdapat kendala yang mempengaruhi pembangunan yang sehat. Berdasarkan hal tersebut, agar tidak terjadi ketimpangan terhadap

pembangunan kesehatan antar daerah, maka perlu dilakukan perbaikan sistem jaminan kesehatan masyarakat. Menurut Sistem Kesehatan Nasional pembangunan kesehatan adalah masyarakat, negara, dan negara yang bercirikan penduduknya, penduduk tersebut hidup dalam lingkungan yang sehat, memiliki gaya hidup bersih dan sehat (PHBS), serta memiliki kemampuan berkeadilan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata (Depkes 2013).

Pemerintah telah melaksanakan berbagai macam program kesehatan untuk menciptakan kesejahteraan kesehatan masyarakat, dimana salah satunya adalah program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dilandasi amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Program jaminan kesehatan sosial ini telah dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dari tahun 2005. Hal ini diawali dengan mencanangkan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang diperuntukan kepada Masyarakat Miskin / JPKMM, yang mana program ini lebih dikenal dengan program Askeskin (2005-2007). Namun pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 program Askeskin berubah nama menjadi program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Kemudian pada tahun 2014 program Jaminan Kesehatan (JKN) kembali dimulai yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS). Penyelenggaraan kegiatan Jaminan kesehatan oleh BPJS diatur Undang-Undang nomor 24 tahun 2011, tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Program jaminan kesehatan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah salah satu upaya yang dilakukan agar kesehatan perorangan bersifat komprehensif dan bermutu, yang mencakup aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif (Kemenkes, 2011).

Di Negara Indonesia Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (SJSN) merupakan bagian dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang berkembang saat ini. Mekanisme pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional yang mewajibkan semua warga negaranya ikut menjadi anggota dalam program tersebut. Namun tingkat partisipasi masyarakat masih sangat rendah, terutama di masyarakat pedesaan dan pinggiran kota, meskipun masyarakat mengetahui bahwa hidup penuh dengan ketidakpastian yang akan menimbulkan resiko kerugian, tidak semua orang dapat memutuskan untuk mengikuti program jaminan kesehatan tersebut. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu umur, pendidikan, pekerjaan, pendapatan / kekayaan, jenis kelamin, gaya hidup dan distribusi penduduk. Hal senada juga dikemukakan oleh Mulyadi dalam Maharani (2014), yang menyebutkan bahwa terdapat tujuh (7) faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat untuk mau ikutserta pada program jaminan sosial, diantaranya : usia, tingkat pendidikan, matapencarian, pendapatan, jenis kelamin, status sosial, dan sebaran penduduk.

Partisipasi masyarakat juga dipengaruhi oleh pengetahuan dan pemahaman tentang asuransi kesehatan. Pengukuran tingkat kesadaran, Pengetahuan dan pemahaman dapat diketahui dengan memperhatikan perbedaan jenis kelamin, usia dan tingkat pendidikan. Status sosial, pendidikan, pendapatan dan pengeluaran dapat digunakan untuk menguji hubungan antara karakteristik seseorang dan kesadaran dan pengetahuannya tentang asuransi kesehatan. Conyers (1991 dalam Ishak, Rostin, Nusantara 2016) mengemukakan pentingnya partisipasi sebagai berikut : pertama, Partisipasi masyarakat merupakan sarana untuk memperoleh informasi tentang kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat yang mana Jika tidak ada rencana pembangunan, proyek akan gagal : kedua, jika masyarakat merasa terlibat dalam program pembangunan, maka mereka akan lebih mempercayai proyek atau pembangunan tersebut

Bab 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjelaskan bahwa informasi mengacu pada data, fakta dan penjelasan yang mengandung nilai, makna dan informasi, pernyataan, gagasan dan simbol tersebut dapat dikemas. Data, fakta dan penjelasan yang disajikan, serta format yang disajikan didasarkan pada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi elektronik dan non elektronik. Sedangkan lembaga publik adalah lembaga administratif, legislatif, dan yudikatif serta lembaga lain yang fungsi dan tugas pokoknya terkait dengan penyelenggaraan negara, sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan / atau APBD, sehingga lembaga publik harus terbuka untuk umum. Informasi publik diartikan sebagai informasi yang didapatkan, disimpan, dikelola, dikirim dan / atau diterima oleh

sistem administrasi negara dan lembaga publik yang terlibat sesuai dengan Undang-Undang tersebut, serta informasi lain yang berhubungan dengan kemaslahatan masyarakat banyak.

Sedangkan dalam pengimplementasian keterbukaan informasi adalah dengan melakukan sosialisasi. Sosialisasi adalah Sebagai penyebarluasan informasi (prosedur, kebijakan, regulasi) dari satu pihak (pemilik program, kebijakan, regulasi) ke pihak lain (pejabat, masyarakat yang terkena program, dan masyarakat). Sosialisasi adalah bentuk strategis penyebaran informasi. Komunikasi berperan dalam mensosialisasikan nilai-nilai masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi sebagai proses aktivitas yang terjadi secara dinamis. Sosialisasi juga bertujuan sebagai sarana untuk melestarikan, menyebarluaskan, dan mewarisi nilai, norma, dan kepercayaan yang terdapat dalam masyarakat agar seluruh anggota masyarakat dapat menjaga nilai, norma dan kepercayaan tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2016), tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada pekerja bukan penerima upah di Desa Kasiyah Timur, didapatkan faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang berpartisipasi menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yaitu pendidikan, pengetahuan, pendapatan, persepsi, motivasi, dengan niat memiliki pengaruh terhadap partisipasi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dari rekapan kepesertaan BPJS Wilayah Padang di Provinsi Sumatera Barat Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dengan capaian peserta sejak tahun 2014 dengan jumlah kepesertaan JKN sebanyak 133,42 juta jiwa (101, 55%) dari target pencapaian sebanyak 131.38 juta jiwa, tahun 2015 dengan jumlah kepesertaan 156,79 juta jiwa (92,96%) dari target pencapaian 168,66 juta jiwa, tahun 2016 dengan jumlah kepesertaan sebanyak 171,94 juta jiwa (91,12%) dari target pencapaian sebanyak 188,70 juta jiwa dan tahun 2017 jumlah kepesertaan 187,98 juta jiwa (93,19%) dari target pencapaian sebanyak 201,72 juta jiwa (BPJS Kesehatan 2017).

Sedangkan untuk data kepesertaan di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1. Jumlah Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 sampai Tahun 2018**

NO	TAHUN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KEPESERTAAN JKN	%
1	2014	365.389 Jiwa	170.629 Jiwa	46,7
2	2015	368.985 Jiwa	184.198 Jiwa	49,9
3	2016	372.500 Jiwa	190.976 Jiwa	51,3
4	2017	376.072 Jiwa	209.357 Jiwa	55,6
5	2018	379.514 Jiwa	214.188 Jiwa	56,4

Sumber : Laporan Tahunan Seksi JKN Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018

Berdasarkan uraian yang disampaikan diatas penulis ingin melakukan penelitian tentang Hubungan Keterbukaan Informasi dan Penggunaan Media dengan Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui hubungan antara keterbukaan informasi dengan partisipasi masyarakat jadi peserta Jaminan Kesehatan Nasioanal (JKN) di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- b. Mengetahui hubungan antara penggunaan media Program Jaminan Kesehatan Nasioanal (JKN) dengan tingkat partisipasi masyarakat untuk ikut jadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Lima Puluh Kota

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian Kuantitatif dengan metode survei dengan populasi yang ditetapkan adalah semua masyarakat yang tidak termasuk dalam data peserta PBI sebanyak 59.644 jiwa. Sementara itu sampel dalam penelitian ini adalah Kecamatan dekat dari Ibu kota

adalah Kecamatan Harau, Kecamatan Jauh dari Ibu Kota adalah Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kecamatan sangat jauh dari Ibu Kota adalah Kecamatan Kapur IX. Data dalam penelitian ini diperoleh dari responden yang tidak termasuk dalam data peserta PBI. Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu, yaitu masyarakat yang tidak termasuk dalam data peserta PBI di Kabupaten Lima Puluh Kota. Mereka dimintak kesediannya untuk mengisi kuesioner yang sudah disiapkan peneliti.

Metode yang digunakan untuk mengambil sampel penelitian adalah metoda *Proportionate stratified Random Sampling* atau pengambilan sampel dengan memperhatikan tingkatan pada populasi). Populasi dikelompokkan menjadi beberapa tingkatan berdasarkan sifat dan karakternya. Pengelompokan populasi tersebut bertujuan agar pengambilan sampel penelitian merata pada seluruh tingkatan dan sampel yang ditetapkan dapat mewakili seluruh populasi.

Pada penelitian ini, terdapat data yang di analisis menggunakan metoda kuantitatif dengan menggunakan aplikasi *Microsoft Excel 2010* dan *SPSS For Windows 20.0*. Hasil olahan data selanjutnya dideskripsikan dengan menyajikan *dummy table* dari tabel frekuensi. Penyajian data awal responden untuk masing-masing variabel penelitian disajikan menggunakan aplikasi *Microsoft Excel 2010* dan diolah menggunakan aplikasi SPSS (*Statistical Package For Social Sciences*) berdasarkan hipotesis penelitian. Selanjutnya untuk mendapatkan hubungan keterbukaan informasi dan partisipasi JKN dilakukan uji korelasi *Rank Spearman*.

Rumus yang dipakai untuk mengklasifikasikan nilai pada hasil penelitian dilakukan dengan perhitungan nilai tertinggi dibagi jumlah kelas yang diinginkan. Di dalam kuesioner, skor tertinggi ialah 4, dan jumlah kelas terbagi menjadi 3 yaitu: Rendah, Sedang, Tinggi. Sehingga klasifikasi nilai ialah sebagai berikut: kategori rendah ( $< 1,33$ ), kategori sedang ( $1,33 - 2,66$ ) dan kategori tinggi ( $> 266$ )

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Keterbukaan Informasi

#### a. Sumber Informasi

Variabel Sumber informasi terdiri dari lima indikator yaitu : melalui Televisi/radio, melalui sosial media (medsos), melalui Koran, melalui ceramah dan melalui media cetak. Sementara jumlah item pertanyaan berjumlah (9) pertanyaan. Adapun gambaran Sumber Informasi adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. Sumber Informasi Responden**

No	Indikator Variabel Sumber Informasi	Rata - Rata	Kategori
1	Melalui Televisi / Radio	2,96	Tinggi
2	Melalui Media Sosial (Medsos)	2,97	Tinggi
3	Melalui Koran	2,18	Sedang
4	Melalui Ceramah / Penyuluhan	2,30	Sedang
5	Melalui Media Cetak	2,33	Sedang
Rata-rata Indikator Variabel Sumber Informasi		2,54	Sedang

Sumber : Data Penelitian Diolah Peneliti Pada Tahun 2020

Tabel 2 diatas menjelaskan bahwa sumber informasi responden berada pada kategori Sedang dengan nilai rata-rata sebesar 2,54. Data tersebut diolah berdasarkan perhitungan dari kuesioner penelitian yang telah disebarakan sesuai variabel tentang keterbukaan informasi. Dari tabel data terlihat bahwa skor rata-rata tertinggi sumber informasi adalah pada indikator melalui Media Sosial (medsos) dengan nilai rata-rata 2,97. Kemudian skor terendah terdapat pada indikator komunikasi Melalui Koran dengan nilai rata-rata sebesar 2,18 dan berada berada di kategori sedang. Sementara untuk indikator Melalui Televisi / Radio memiliki nilai rata-rata 2,96 berada

pada kategori tinggi. Sedangkan untuk indikator Melalui Media Cetak dengan nilai rata - rata 2.33 berada pada kategori sedang. Untuk indikator Melalui Ceramah / Penyuluhan dengan nilai rata-rata 2,30 juga berada pada kategori sedang. Adapun rata-rata indikator variabel Sumber Informasi sebesar 2,54 dengan kategori sedang. Kategori sedang menjelaskan bahwa responden sering dan kadang-kadang mendengar atau mendapatkan informasi dari Melalui Media Sosial (Medsos) dalam kehidupan sehari-hari untuk mendapatkan informasi atau untuk mengakses informasi tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

b. Akses Informasi

Variabel akses informasi terdiri dari tiga indikator yaitu : melalui di Fakes, di Tempat - Tempat Umum lainnya dan Kemudahan mendapatkan. Sementara jumlah item pertanyaan berjumlah (9) pertanyaan. Adapun gambaran Akses Informasi adalah sebagai berikut :

**Tabel 3. Akses Informasi Responden**

No	Indikator Variabel sumber Informasi	Rata – Rata	Kategori
1	Di fakes	3,01	Tinggi
2	Di Tempat Tempat Umum Lainnya	2,34	Sedang
3	Kemudahan mendapatkan informasi	3,55	Tinggi
	Rata-rata Indikator Variabel Akses Informasi	2,96	Sedang

Hasil yang dapat disimpulkan berdasarkan tabel diatas adalah bahwa akses informasi berdasarkan tanggapan dari responden berada pada kategori sedang dengan nilai rata-rata dari tanggapan responden sebanyak 2.96. Selanjutnya berdasarkan tabel 3 juga dapat disimpulkan bahwa responden dengan mudah mendapatkan informasi tentang Program Jaminan Kesehatan dari faskes yang ada.

**2. Penggunaan Media**

Variabel penggunaan media terdiri dari Empat indikator yaitu : mendapatkan informasi poster/*banner*, pemahaman informasi di poster/*barner*, mendapatkan informasi melalui *leaflet*/*brosur* dan pemahaman informasi di *leaflet*/*brosur*. Adapun gambaran Penggunaan Media adalah sebagai berikut :

**Tabel 4. Penggunaan Media Responden**

No	Indikator Variabel Sumber Informasi	Rata - Rata	Kategori
1	Mendapatkan Informasi Melalui Poster / Barner	2,53	Sedang
2	Pemahaman Informasi Melalui Poster / Barner	2,64	Sedang
3	Mendapatkan Informasi Melalui Leaflet / Brosur	2,45	Sedang
4	Pemahaman Informasi Melalui Leaflet / Brosur	2,25	Sedang
	Rata-rata Indikator Variabel Sumber Informasi	2,46	Sedang

Tabel 4 diatas menjelaskan bahwa pada variabel penggunaan media di dapatkan nilai rata-rata sebesar 2,46 dengan kategori sedang. Skor tertinggi terdapat pada indicator tentang pemahaman informasi responden melalui poster/barner dengan nilai rata-rata 2,64 dan berada pada kategori sedang. Sedangkan skor terendah ialah pemahaman informasi melalui *leaflet*/brosur dengan rata-rata nilainya sebesar 2.25 dan 2,45 berada pada kategori sedang. Selanjutnya nilai rata-rata indikator mendapatkan informasi melalui poster/*banner* dengan nilai rata-rata 2.53 berada pada kategori sedang. Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa media yang serng dilihat dan dimanfaatkan oleh responden adalah poster/barner.

### 3. Partisipasi dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Variabel Partisipasi dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terdiri dari lima indikator yaitu: membayar tepat waktu, memanfaatkan kartu, mengajak orang lain, melakukan pengawasan program dan membandingkan alur pelayanan. Sementara jumlah item pertanyaan berjumlah (5) pertanyaan. Adapun gambaran Partisipasi adalah sebagai berikut :

**Tabel 5. Partisipasi dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)**

No	Indikator Variabel Sumber Informasi	Rata - Rata	Kategori
1	Membayar Premi Tepat Waktu	2,97	Tinggi
2	Memanfaatkan Kartu	2.38	Sedang
3	Mengajak Orang Lain	2.63	Sedang
4	Melakukan Pengawasan Program	1.85	Sedang
5	Membandingkan Alur Pelayanan	1.88	Sedang
Rata-rata Indikator Variabel Akses Informasi		2,34	Sedang

Nilai rata-rata indikator variabel partisipasi responden pada program JKN yang digambarkan pada tabel 5 diatas berada pada kategori sedengan dengan nilai rata-rata sebesar 2,34.

Dari tabel 5 dapat terlihat skor indikator tertinggi ialah membayar premi tepat waktu dengan nilai rata-rata 2.97 dan berada pada kategori tinggi. Sedangkan skor terendah ialah melakukan pengawasan program dan membandingkan alur pelayanan dengan nilai rata-rata 1.85 dan 1.88 berada pada kategori sedang. Selanjutnya, nilai rata-rata indikator mengajak orang lain dan memanfaatkan kartu dengan nilai 2.63 dan 2.38 sama-sama pada kategori sedang. Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi responden dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) cukup baik.

### 4. Partisipasi dalam Program JKN

**Tabel 6. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Partisipasi dalam Program JKN di Kabupaten Lima Puluh Kota**

Partisipasi	Frekuensi (F)	Persentase (%)
Tidak	101	26.5
Ya	280	73.5
Total	381	100.0

Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat bahwa lebih dari sebagian responden yaitu 280 responden (73,5%) berpartisipasi dalam program JKN dan 26,5 % tidak berpartisipasi dalam program JKN.

### 5. Hubungan antara Keterbukaan Informasi (Media Informasi, Akses Informasi) dengan Partisipasi dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Analisis hubungan antara keterbukaan informasi (media informasi, akses informasi) dengan partisipasi masyarakat hanya dapat dilakukan apabila semua data yang akan dianalisis terkumpul. Analisis perhitungan dilakukan dengan menjumlahkan semua nilai per variabel, dan

akan dilanjutkan dengan pengujian selanjutnya apabila semua datanya sudah siap. Seperti yang telah disampaikan pada metode penelitian setelah semua data variabel lengkap, selanjutnya dilakukan uji korelasi (*Rank Spearman*) dengan menggunakan aplikasi SPSS for windows 20.0. Hipotesis yang diuji adalah hubungan keterbukaan informasi (media informasi, akses informasi) dengan partisipasi masyarakat dengan menggunakan uji korelasi *Rank Spearman*. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan dengan metoda tersebut didapatkan koefisien sebesar 0,192. Dimana nilai koefisien tersebut didapatkan dengan bantuan SPSS model *summary*. Nilai perhitungan tersebut dapat dilihat pada tabel 7 berikut :

**Tabel 7 Hubungan antara Keterbukaan Informasi (Media Informasi, Akses Informasi) dengan Partisipasi dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Lima Puluh Tahun 2017**

Model	Summary
Variabel Independen	Keterbukaan informasi
Variabel dependen	Partisipasi masyarakat
Koefisien korelasi rank spearman	0,192
Nilai signifikan	0,000
T hitung	4,158

Kesimpulan yang dapat ditarik pada tabel 7 diatas adalah bahwa keterbukaan informasi (media informasi, akses informasi) memiliki hubungan positif terhadap partisipasi masyarakat jadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional. Artinya setiap peningkatan keterbukaan informasi sebesar 1 % maka partisipasi masyarakat juga meningkat sebesar 0,192 persen. Kemudian dapat dilihat bahwa  $t$  hitung  $>$  dari  $t$  tabel. Karena nilai  $t$  hitung  $>$   $t$  table, maka  $H_0$  tidak dapat ditolak atau  $r$  memang berkorelasi positif. Sehingga dapat disimpulkan semakin tinggi keterbukaan informasi, maka semakin meningkat partisipasi masyarakat dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hasil analisis yang dilakukan dengan menggunakan SPSS didapatkan nilai yang signifikan dimana didapatkan hasil sebesar 0,000 yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara keterbukaan informasi dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam penggunaan JKN.

## 6. Hubungan antara Penggunaan Media dengan Partisipasi dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Analisis selanjutnya ialah hubungan Penggunaan media dengan partisipasi masyarakat. Dengan menggunakan uji rank spearman, yang mana pada pengujian ini dibantu dengan aplikasi SPSS serta dilakukan dengan menggunakan perhitungan uji korelasi *Rank Spearman*, didapatkan koefisien korelasi sebesar 0,126 terhadap hubungan antara penggunaan media dengan partisipasi dalam program jaminan kesehatan nasional (JKN). Berdasarkan pedoman interpretasi Guilford, nilai korelasi 0,126 dikategorikan pada kategori hubungan yang cukup. Selanjutnya  $t$  hitung diuji dengan menggunakan rumus yang telah ditetapkan pada hipotesis pertama pada penelitian ini dengan menggunakan bantuan SPSS model *summary* untuk menganalisis datanya. Hasil perhitungan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 8. Hubungan antara Penggunaan Media dengan Partisipasi dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017**

Model	Summary
Variabel Independen	Penggunaan media
Variabel dependen	Partisipasi masyarakat
Koefisien korelasi rank spearman	0,126
Nilai signifikan	0,014
T hitung	2,623

Pada tabel 8 tersebut dapat dilihat bahwa hasil koefisien korelasi *rank spearman*nya sebesar 0,126. Dengan arti kata terdapat hubungan yang positif antara penggunaan media dengan partisipasi masyarakat peserta Jaminan Kesehatan Nasional. Artinya setiap peningkatan penggunaan media sebesar 1 % maka partisipasi masyarakat juga meningkat sebesar 0,126 persen. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa meningkatnya penggunaan media, maka tingkat partisipasi masyarakat juga akan meningkat. Hasil analisis dengan menggunakan SPSS terdapat juga nilai yang signifikan dengan nilai sebesar 0,014 dengan artian bahwa adanya hubungan yang signifikan antara penggunaan media dengan partisipasi masyarakat dalam penggunaan JKN.

Temuan dari hasil analisis yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Keterbukaan Informasi (Sumber Informasi, Akses Informasi) dengan Partisipasi dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi memiliki hubungan positif terhadap partisipasi masyarakat dalam kepesertaan JKN. Ini menggambarkan bahwa semakin tinggi keterbukaan informasi, maka semakin meningkat partisipasi masyarakat dalam program JKN. Disisi lain, hasil analisis juga menunjukkan bahwa sumber informasi berada pada kategori sedang, yang artinya dalam kehidupan sehari-hari responden sering dan kadang-kadang mendengar atau mendapatkan informasi dari media sosial (Medsos) tentang Program JKN. Dengan data diatas dapat disimpulkan sumber informasi bagi masyarakat tentang Program JKN yang paling sering diakses adalah Media Sosial. Selanjutnya untuk akses informasi, responden berada pada kategori tinggi, ini berarti masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota paling banyak mendapatkan informasi tentang Program JKN di Faskes (Fasilitas Kesehatan). Hal ini sejalan dengan penelitian Pujiyati (2018) yang menyatakan bahwa keterbukaan informasi memudahkan interaksi masyarakat dan pemerintah secara langsung, sehingga masyarakat mudah untuk memperoleh informasi serta menyampaikan aduan dan keluhan kapanpun dimanapun.

2. Penggunaan media dengan partisipasi dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Penelitian ini menunjukkan bahwa Penggunaan media memiliki hubungan positif dengan partisipasi dalam program JKN. Hal ini menggambarkan bahwa semakin tinggi penggunaan media maka semakin besar partisipasi masyarakat dalam program JKN. Dalam Penggunaan media diketahui bahwa mendapatkan informasi melalui poster / banner berada pada kategori sedang artinya poster / banner adalah jenis media cetak yang lebih sering dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mendapatkan informasi tentang program JKN. Hal ini selaras dengan penelitian Atika (2019) yang menyatakan terdapat hubungan yang signifikan antara penggunaan media sosial dan partisipasi politik.

Menurut *Hunter* (2002) yang dikutip kembali oleh Nasrullah (2016), dengan menggunakan media social semua informasi dapat dicari dengan mudah. Dengan demikian dengan adanya media sosial, maka akan mempermudah stakeholder untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat banyak.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian responden Keterbukaan Informasi, Penggunaan Media dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2017, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Ada hubungan positif antara keterbukaan informasi (media informasi, akses informasi) dengan tingkat partisipasi masyarakat untuk ikut jadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Ada hubungan positif antara penggunaan media program JKN dengan tingkat partisipasi masyarakat untuk ikut jadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017

**E. DAFTAR PUSTAKA**

- Riyadi dan Bratakusumah. 2005. Peran masyarakat dalam pembangunan. Jakarta: Multigrafik
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 903. 2011. Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat.
- Maharani, Kurnia dan Sri Isnawati. (2014). Kajian Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja dan Keterbukaan Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Jawa Tengah. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Vol. 21, No. 21, Hal 62-72.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Yuli Puspitasari. 2016. Faktor yang mempengaruhi Partisi[asi Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional pada Pekerja Bukan Penerima Upah di Desa Kasiyan Timur Wilayah Kerja Puskesmas Kasiyan Kabupaten Jember Tahun 2016. Skripsi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember.
- BPJS Kesehatan 2017. Laporan Pengelolaan Program Dan Laporan Keuangan Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2017
- Atika Aisyarahmi Munzir, Asmawi dan Aidinil Zetra. 2019. Beragam Peran Media Sosial dalam Dunia Politik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*
- Pujiyati. 2018. Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pengelolaan Sistem. Informasi Manajemen Pemerintah Daerah Melalui Media Sosial (Studi Deskriptif Kualitatif Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Penggunaan #KemalaJateng di Twiter. Skripsi Programstudi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Nasrullah, Rulli. 2016. Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sioteknologi. Bandung : Simbiosis Rakatama Media.